

EVALUASI INISIATIF BLUE DIGITAL PERUSAHAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI INDONESIA

Yosef Pranata, Richard Andrew

Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya

richardandrew@ukdc.ac.id

Abstract

This paper examined the role of Blue Accounting digital as an innovative mechanism to simultaneously address poverty alleviation and environmental sustainability. The study applied a conceptual research approach supported by content analysis of sustainability disclosure practices in the marine and fisheries sector in Indonesia. The analysis focused on dimensions such as community involvement, resource efficiency, emission reduction, biodiversity protection, and economic inclusion. The results showed that companies implementing comprehensive Blue Accounting practices, particularly in line with sustainability reporting standards, demonstrated higher transparency, stronger environmental stewardship, and better integration with local community livelihoods. In particular, Blue Accounting contributed to poverty alleviation by strengthening partnerships with small-scale fishers and ensuring fair access to supply chains, while also contributing to environmental sustainability through improved monitoring of emissions, biodiversity, and ecosystem conservation. The findings emphasized that Blue Accounting could serve as a strategic innovation that aligns with the Sustainable Development Goals. This study contributed to the development of sustainability accounting frameworks and offered practical implications for policymakers, corporations, and civil society to integrate environmental accountability with social inclusion for resilient blue economies

Keywords: Blue Accounting, Environmental Sustainability, Innovation, Sustainability Disclosure

ABSTRAK

Paper ini mengkaji peranan Blue Accounting digital sebagai mekanisme inovatif untuk menangani pengurangan kemiskinan dan kelestarian alam sekitar secara serentak. Kajian ini menggunakan pendekatan penyelidikan konseptual yang disokong oleh analisis kandungan amalan pendedahan kelestarian dalam sektor marin dan perikanan di Indonesia. Analisis ini memberi tumpuan kepada dimensi seperti penglibatan masyarakat, kecekapan sumber, pengurangan pelepasan, perlindungan kepelbagaian biologi, dan kemasukan ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahawa syarikat yang melaksanakan amalan perakaunan biru yang komprehensif, terutama sesuai dengan standard pelaporan keberlanjutan, menunjukkan ketelusan yang lebih tinggi, pengawasan alam sekitar yang lebih kuat, dan integrasi yang lebih baik dengan mata pencaharian masyarakat setempat. Khususnya, perakaunan Biru menyumbang kepada pengurangan kemiskinan dengan memperkuat perkongsian dengan nelayan berskala kecil dan memastikan akses yang adil ke rangkaian bekalan, sambil juga menyumbang kepada kelestarian alam sekitar melalui pemantauan pelepasan, keanekaragaman hayati, dan pemuliharaan ekosistem yang lebih baik. Penemuan ini menekankan bahawa perakaunan biru boleh berfungsi sebagai inovasi strategik yang sejajar dengan Matlamat Pembangunan Mampan. Kajian ini menyumbang kepada pembangunan rangka kerja perakaunan kemampan dan menawarkan implikasi praktikal untuk pembuat dasar, syarikat, dan masyarakat sivil untuk mengintegrasikan akauntabiliti alam sekitar dengan kemasukan sosial untuk ekonomi biru yang berdaya tahan

Kata kunci: Akuntansi Biru, Kelestarian Alam Sekitar, Inovasi, Pengungkapan Keberlanjutan

PENDAHULUAN

Pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan tetap menjadi dua tantangan global paling mendesak pada abad ke-21, yang menuntut solusi inovatif dan segera baik dalam wacana akademik maupun praktik kebijakan. Meskipun telah terjadi kemajuan signifikan dalam upaya pengurangan kemiskinan di berbagai belahan dunia, sekitar 9,2% populasi global masih hidup dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2022, dengan mayoritas berada di negara berkembang yang tingkat ketergantungannya terhadap sumber daya alam masih sangat tinggi (World Bank, 2022). Pada saat yang sama, degradasi lingkungan terus meningkat, tercermin dari hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan menurunnya ekosistem laut sebagai konsekuensi dari praktik ekonomi yang tidak berkelanjutan (United Nations, 2023).

Keterkaitan antara pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan telah diakui secara luas dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 14 (Ekosistem Laut), yang menekankan perlunya solusi integratif yang mampu menjawab dimensi sosial-ekonomi dan ekologi secara bersamaan. Namun, dalam praktiknya, sistem ekonomi dan akuntansi konvensional sebagian besar gagal merespons tantangan tersebut karena secara tradisional hanya menekankan kinerja keuangan sambil mengabaikan batasan ekologis, keadilan sosial, dan keberlanjutan jangka panjang—suatu kondisi yang oleh Gray (2010) disebut sebagai “triple failure” dalam akuntansi tradisional.

Kegagalan ini semakin nyata pada sektor yang sangat bergantung pada sumber daya alam seperti perikanan dan akuakultur, di mana jutaan pelaku usaha berskala kecil menggantungkan mata pencaharian mereka pada ekosistem laut. Ketiadaan mekanisme akuntabilitas yang komprehensif telah memperburuk degradasi ekologi sekaligus meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi (Kittinger et al., 2017). Kondisi ini menegaskan urgensi pengembangan kerangka akuntansi inovatif yang mampu mengintegrasikan dimensi keuangan, ekologis, dan sosial untuk memastikan keberlanjutan dan inklusivitas dalam hasil pembangunan.

Namun demikian, terdapat kesenjangan signifikan antara teori dan praktik. Dari perspektif fenomenologis, ketiadaan mekanisme pengelolaan sumber daya dan pelaporan yang transparan telah menyebabkan ketimpangan sosial-ekonomi dan degradasi lingkungan yang terus berlanjut di komunitas pesisir. Dari perspektif teoretis, literatur akuntansi keberlanjutan masih terbatas dalam mengeksplorasi paradigma alternatif seperti ekonomi biru yang mampu mengintegrasikan pengelolaan ekologi secara holistik dengan akuntabilitas keuangan. Sementara itu, dari perspektif empiris, penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada kerangka ESG atau pelaporan keberlanjutan secara umum, dengan bukti empiris yang relatif terbatas untuk sektor kelautan dan perikanan di Indonesia, meskipun sektor ini sangat penting bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat pesisir (Frias-Aceituno et al., 2013).

Dalam konteks tersebut, **Blue Accounting** muncul sebagai inovasi transformatif yang berakar pada paradigma ekonomi biru, dengan tujuan menjembatani berbagai kesenjangan tersebut melalui integrasi indikator keuangan, ekologis, dan sosial ke dalam kerangka pelaporan keberlanjutan. Berbeda dengan sistem akuntansi konvensional, Blue Accounting menekankan indikator multidimensional seperti keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, konservasi keanekaragaman hayati, pengurangan emisi, dan inklusi ekonomi (O'Donnell et al., 2019; Haqi & Yudi, 2023), sehingga menyediakan landasan holistik bagi proses pengambilan keputusan yang selaras dengan prinsip pelaporan terintegrasi dan akuntabilitas ESG.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Keberlanjutan

Akuntansi tradisional sejak lama dikritik karena fokusnya yang sempit pada kinerja finansial dan mengabaikan eksternalitas terkait keadilan sosial dan degradasi lingkungan (Gray, 2010). Sebagai respons, kerangka green accounting dan akuntansi lingkungan diperkenalkan untuk menangkap biaya dan dampak ekologis (Bebbington & Larrinaga, 2014). Di sisi lain, akuntansi sosial menekankan pengungkapan informasi tentang keterlibatan masyarakat, kondisi tenaga kerja, dan keadilan sosial (Unerman & Chapman, 2014).

Mengembangkan tradisi tersebut, **Blue Accounting** muncul sebagai pendekatan spesifik untuk sektor kelautan dan pesisir. Berbeda dengan green accounting atau akuntansi sosial yang cakupannya luas, Blue Accounting secara langsung berfokus pada ekosistem laut, perikanan, akuakultur, dan komunitas pesisir (O'Donnell et al., 2019). Cakupannya meliputi konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian emisi dalam operasi perikanan, penggunaan air yang berkelanjutan, serta keterlacakan rantai pasok. Fokus ini menjadikan Blue Accounting sangat relevan bagi perekonomian yang mata pencaharian jutaan penduduknya bergantung pada sumber daya laut.

Blue Accounting

Blue Accounting memperluas pelaporan keberlanjutan dengan secara eksplisit menghubungkan kinerja perusahaan dengan pengelolaan sumber daya laut dan inklusi sosial. Pendekatan ini menekankan:

1. **Keterlibatan masyarakat:** melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam pengambilan keputusan.
2. **Efisiensi sumber daya:** meminimalkan limbah, energi, dan penggunaan air.
3. **Perlindungan biodiversitas:** menjaga kelestarian habitat laut yang kritis.
4. **Inklusi ekonomi:** mengintegrasikan nelayan kecil ke dalam rantai nilai.
5. **Transparansi:** memastikan keterlacakan rantai pasok dan kepatuhan terhadap regulasi.

Sebagai sebuah inovasi, Blue Accounting melampaui kepatuhan administratif dengan menyediakan wawasan aplikatif bagi pembuat kebijakan, korporasi, dan masyarakat sipil. Pendekatan ini menciptakan siklus umpan balik antara pelaporan, akuntabilitas, dan tata kelola adaptif. Bukti empiris menunjukkan bahwa perusahaan dengan skor pengungkapan keberlanjutan yang lebih tinggi cenderung menarik kepercayaan investor yang lebih besar dan berkontribusi pada ketahanan jangka panjang (Frias-Aceituno et al., 2013).

Kerangka Teoretis

Penelitian ini berlandaskan pada tiga perspektif teoretis yang saling terkait:

1. **Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory)** – Freeman (1984)
Perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada pemangku kepentingan lainnya seperti karyawan, komunitas, dan lingkungan. Blue Accounting mengoperasionalkan prinsip ini melalui pengungkapan yang transparan.
2. **Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)** – Suchman (1995)
Perusahaan mencari legitimasi sosial dengan menyelaraskan operasi mereka dengan norma dan nilai masyarakat. Pengungkapan keberlanjutan, terutama pada sektor sensitif seperti perikanan, memperkuat *social license to operate*.
3. **Triple Bottom Line (TBL)** – Elkington (1997)
Kinerja berkelanjutan mencakup tiga dimensi: sosial (people), lingkungan (planet), dan ekonomi (profit). Blue Accounting selaras dengan prinsip ini melalui integrasi indikator keuangan, sosial, dan ekologis.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transparansi dalam rantai pasok dapat memberdayakan nelayan kecil dan komunitas lokal untuk memperoleh akses pasar yang lebih adil, sumber pembiayaan, serta kesempatan peningkatan kapasitas (Allison et al., 2020). Sementara itu, perusahaan yang menerapkan praktik pelaporan keberlanjutan secara komprehensif cenderung lebih menarik bagi investor, membangun kepercayaan pemangku kepentingan, dan menunjukkan ketahanan yang lebih baik terhadap risiko iklim (Frias-Aceituno et al., 2013).

<https://journal.icma-nasional.or.id/index.php/JUTRIANCE>

Dengan berlandaskan teori akuntansi keberlanjutan dan paradigma ekonomi biru, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dengan memposisikan Blue Accounting sebagai katalis untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dalam sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh Blue Accounting terhadap pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan, yang menghasilkan dua hipotesis berikut:

H1 — Praktik Blue Accounting berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan pada sektor perikanan di Indonesia.

H2 — Praktik Blue Accounting berpengaruh positif terhadap keberlanjutan lingkungan pada sektor perikanan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan orientasi konseptual dan eksploratif, yang bertujuan mengembangkan pemahaman teoretis mengenai Blue Accounting sebagai inovasi untuk pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan metodologis campuran digunakan melalui kombinasi *systematic literature review* (SLR) dan analisis konten terhadap laporan keberlanjutan perusahaan dalam sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan kedalaman teoretis sekaligus relevansi kontekstual.

Desain penelitian disusun dalam tiga tahapan. Pertama, dilakukan *systematic literature review* untuk menelaah penelitian terdahulu terkait akuntansi keberlanjutan, ekonomi biru, dan keterkaitan antara kemiskinan dan lingkungan. Tahap ini bertujuan mengidentifikasi landasan teoretis, kesenjangan konseptual, serta perdebatan terbaru dalam bidang tersebut.

Kedua, analisis konten dilakukan terhadap pengungkapan korporasi dari perusahaan perikanan dan akuakultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tahap ini bertujuan mengevaluasi tingkat dan kualitas pengungkapan Sustainability Blue Disclosure (SBD) pada perusahaan-perusahaan tersebut.

Ketiga, tahap sintesis digunakan untuk mengintegrasikan temuan dari kedua proses analisis guna membangun kerangka konseptual Blue Accounting sebagai inovasi strategis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Profil perusahaan pada sektor akuakultur dan perikanan tangkap yang dianalisis melalui *content analysis* terhadap Sustainability Blue Disclosure dalam penelitian ini ditampilkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1

Perusahaan Marine & Fisheries Resources yang terdaftar di IDX IC

Perusahaan	Terdaftar	Bisnis Area
PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk (ENZO)	10 Januari 2013 / September 14, 2020	processor and exporter of food sea frozen and canned.
PT Prima Cakrawala Abadi Tbk (PCAR)	29 Januari 2014 / December 29, 2017	fisheries product industry, especially crab
PT Era Mandiri brilliant Tbk (FISH)	14 November, 2000 / 12 Februari 2020	Manufacturers and suppliers of food sea form mahi-mahi, tuna, swordfish, oil fish, red snapper, grouper, octopus, mackerel, kingfish, and albacore products
PT Central Proteina Prima Tbk (CPRO)	18 Agustus, 1980 / 28 November, 2006	integrated shrimp cultivation business, production and sales of shrimp, fish and feed cattle other
PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP)	16 Maret, 1999 / 14 Oktober, 2002	Cultivation, distribution, and trading of Arowana fish.
PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk (DSFI)	2 Oktober 1973 / 24 Maret, 2000	Fishery, incl wild, processing, sale, and trade product fishery

Setelah menganalisis laporan keberlanjutan dari perusahaan-perusahaan tersebut, ditemukan bahwa tidak semua perusahaan di sektor kelautan dan perikanan tangkap menerbitkan laporan keberlanjutan secara lengkap untuk periode 2018–2022. Selain itu, hanya satu perusahaan yang secara konsisten menerbitkan laporan keberlanjutan dari tahun 2018 hingga 2022. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin memandang laporan tahunan sebagai dokumen yang sudah cukup untuk menyampaikan informasi perusahaan, sementara penerbitan laporan keberlanjutan dianggap bersifat opsional.

Tabel 2 menyajikan rincian lengkap mengenai penerbitan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan pada periode 2018–2022.

Tabel 2
Publikasi Laporan Keuangan dan Keberlanjutan Perusahaan Kelautan dan Perikanan Dari 2018 sampai 2022

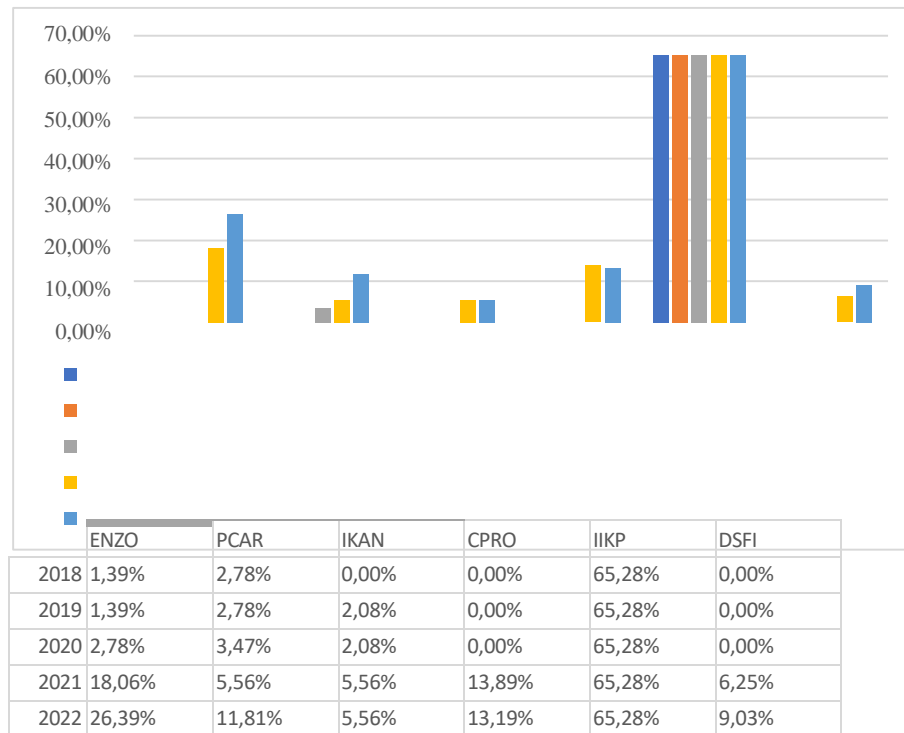
Company	2018		2019		2020		2021		2022	
	AR	SR	AR	SR	AR	SR	AR	SR	AR	SR
ENZO	√	-	√	-	√	-	√	√	√	√
PCAR	√	-	√	-	√	-	√	√	√	√
FISH	√	-	√	-	√	-	√	√	√	√
CPRO	√	-	√	-	√	-	√	√	√	√
IIKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
DSFI	√	-	√	-	√	-	√	√	√	√

Source: www.idx.co.id (2025)

Berdasarkan Gambar 1, indeks SBD secara konsisten berada di bawah 30% sejak tahun 2019 hingga 2022, dengan rata-rata sebesar 15%. Rendahnya proporsi indeks SBD sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Wanta dan Gunawan (2021), yang menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum melihat urgensi untuk menyertakan informasi tambahan (opsional) dalam laporan tahunan karena tidak adanya kewajiban yang mewajibkan pengungkapannya. Selain itu, terbatasnya proporsi informasi SBD juga dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pengungkapan tersebut, terutama ketika tidak ada pertanyaan atau tuntutan dari para pemangku kepentingan.

Sebagai temuan awal, diperkirakan bahwa proporsi informasi SBD akan meningkat di masa mendatang, khususnya dengan diterbitkannya GRI 13 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

GRI 13: Agriculture, Aquaculture, and Wild Fisheries memiliki tujuh dimensi yang sangat terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 14. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Sektor Kelautan dan Perikanan memiliki satu dimensi pengungkapan. Berdasarkan tujuh dimensi tersebut, berikut ini disajikan total skor pengungkapan dari enam perusahaan di sektor perikanan dan kelautan selama periode 2018–2022.



Gambar 1.

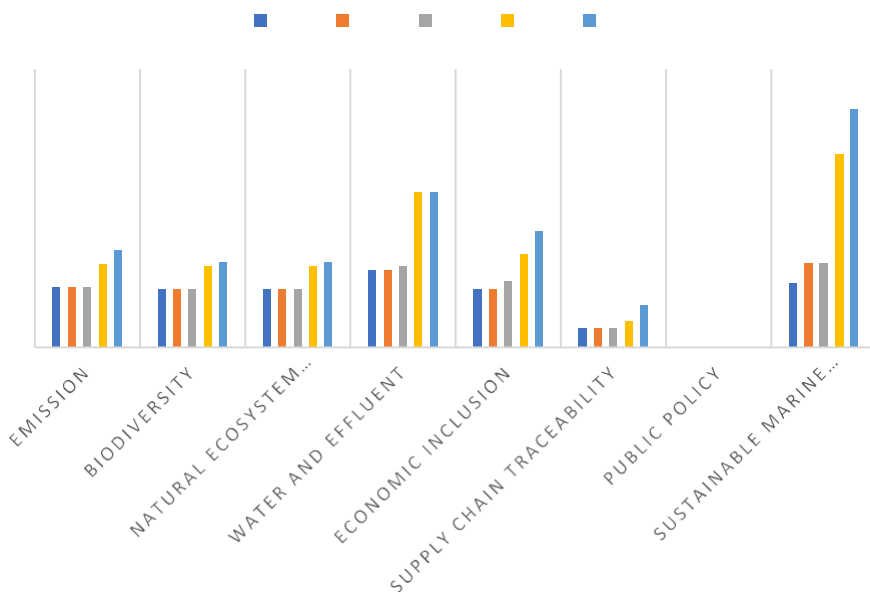
Average of Overall Score

Source: processed data (2025)

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa emiten IIKP menunjukkan indeks pengungkapan SBD tertinggi setiap tahunnya. IIKP, yang telah berdiri sejak tahun 1999, memperoleh skor sebesar **65,28%** untuk pengungkapan indeks SBD yang mendukung SDG 1 dan SDG 14, khususnya pada dimensi *Emissions* terkait indikator pengungkapan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) CO₂ untuk *scopes* 1, 2, dan 3. Demikian pula, pada dimensi *Water and Effluent*, emiten IIKP mengungkapkan pengelolaan dampak pembuangan air dan limbah cair perusahaan secara sangat komprehensif.

Temuan yang menarik dari hasil penelitian ini adalah bahwa emiten DSFI, meskipun telah berdiri lebih lama dibandingkan IIKP, hanya mencapai skor pengungkapan SBD sebesar **9,03%** pada tahun 2022. Sejalan dengan temuan Wanta dan Gunawan (2021), tingkat pengungkapan SBD DSFI merupakan yang terendah di antara enam perusahaan yang diteliti.

Hasil ini menunjukkan bahwa lamanya usia berdirinya suatu perusahaan tidak menjamin adanya kesadaran yang baik dalam mengungkapkan laporan keberlanjutan yang mendukung SDG 1 dan SDG 14.



Gambar 2.

Average of Overall Score

Source: processed data (2025)

Berdasarkan Gambar 2, pada tahun 2021 skor pengungkapan dari enam perusahaan menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun selain IIKP skor pengungkapannya belum mencapai 26%, hasil tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran perusahaan terhadap pentingnya pengungkapan laporan keberlanjutan.

Informasi mengenai pengelolaan laut berkelanjutan, konservasi laut, serta sumber daya pesisir dan ekosistemnya merupakan jenis informasi yang paling banyak diungkapkan sejak tahun 2018. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan berupaya mematuhi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 mengenai Ekonomi Biru.

Adapun tidak diungkapkannya informasi mengenai kebijakan publik oleh perusahaan dapat disebabkan oleh keengganan perusahaan untuk mengungkapkan hubungan mereka dengan pihak-pihak politik, atau dapat pula terjadi karena perusahaan memang tidak memiliki afiliasi dengan partai politik.

Pembahasan

Temuan mengenai peningkatan skor pengungkapan pada tahun 2021 memberikan indikasi awal bahwa perusahaan-perusahaan di sektor kelautan dan perikanan telah mulai merespons dinamika regulasi dan meningkatnya perhatian terhadap prinsip ekonomi biru. Peningkatan ini dapat dilihat sebagai bukti awal bahwa perubahan kebijakan, termasuk penerapan UU No. 11 Tahun 2020 dan pedoman GRI 13, mulai memberikan tekanan institusional bagi perusahaan untuk menyesuaikan praktik pelaporan keberlanjutan mereka.

Namun, secara keseluruhan skor pengungkapan yang masih berada di bawah 30% menunjukkan bahwa praktik *Sustainability Blue Disclosure* (SBD) belum terintegrasi secara menyeluruh ke dalam tata kelola perusahaan. Rendahnya skor ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama:

1. Rendahnya Kematangan Tata Kelola Keberlanjutan

Sebagian perusahaan masih memandang pelaporan keberlanjutan sebagai aktivitas tambahan yang bersifat sukarela, bukan sebagai bagian dari strategi manajemen risiko atau pembangunan jangka panjang. Hal ini sejalan dengan temuan Wanta dan Gunawan (2021), yang menyatakan bahwa banyak perusahaan di Indonesia hanya mengungkap informasi minimum yang diwajibkan.

2. Keterbatasan Kapasitas dan Pengetahuan

Praktik Blue Accounting memerlukan pemahaman teknis mengenai indikator laut, data biodiversitas, emisi GRK, dan pengelolaan ekosistem pesisir. Banyak perusahaan, khususnya berskala kecil atau menengah, belum memiliki sumber daya atau keahlian yang memadai untuk menghasilkan laporan yang komprehensif.

3. Minimnya Tekanan Pemangku Kepentingan

Pengungkapan informasi yang terbatas dapat mencerminkan rendahnya tuntutan dari pemangku kepentingan seperti investor, regulator, dan komunitas lokal. Tanpa adanya tekanan eksternal, perusahaan cenderung hanya mengungkap informasi yang dianggap aman dan tidak sensitif.

4. Sensitivitas Politik dan Reputasi

Tidak diungkapkannya informasi kebijakan publik menandakan bahwa perusahaan ingin menghindari persepsi adanya afiliasi politik tertentu. Keterlibatan politik sering dianggap berisiko karena dapat menimbulkan dugaan konflik kepentingan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis menggunakan teknik *content analysis*, dapat disimpulkan bahwa hanya perusahaan **IKP** yang telah menerapkan prinsip ekonomi biru (*blue economy*) secara konsisten untuk mendukung SDG 1 dan SDG 14. Hal ini disebabkan oleh penerapan standar **GRI** yang telah lama dilakukan oleh IKP sebagai bagian dari implementasi ekonomi biru yang tercermin dalam laporan keberlanjutan perusahaan.

Sementara itu, perusahaan **ENZO, PCAR, IKAN, CPRO, dan DSFI** menunjukkan bahwa mereka mulai bergerak menuju penerapan ekonomi biru untuk mendukung SDG 1 dan SDG 14.

Namun, secara umum, bentuk pengungkapan informasi masih terbatas pada narasi dan angka tanpa penjelasan komprehensif maupun indikator teknis yang lebih mendalam.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi perusahaan maupun regulator dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keselamatan dan keberlanjutan lingkungan, khususnya ekosistem laut, melalui penerapan ekonomi biru secara serius untuk mendukung SDG 1 dan SDG 14.

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah tidak digunakannya **POJK 51/2017** sebagai salah satu dimensi dalam pengukuran Sustainability Blue Disclosure. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan POJK 51/2017, selain **GRI 13** dan **UU No. 11 Tahun 2022**, untuk mengukur seberapa “blue” perusahaan-perusahaan di Indonesia, tidak hanya di sektor kelautan dan perikanan, tetapi juga pada sektor lainnya.

SARAN

Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan dimensi dan indikator dari Blue Accounting agar hasilnya dapat menambah wawasan bagi penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Allison, E. H., et al. (2020). The human relationship with our ocean planet. *Nature Sustainability*, 3(10), 671–681. <https://doi.org/10.1038/s41893-020-0546-5>
- Barbier, E. B. (2010). Poverty, development, and environment. *Environment and Development Economics*, 15(6), 635–660. <https://doi.org/10.1017/S1355770X1000032X>
- Bebbington, J., & Larrinaga, C. (2014). Accounting and sustainable development: An exploration. *Accounting, Organizations and Society*, 39(6), 395–413. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2014.01.003>
- Dasgupta, P., et al. (2019). Global commons, poor nations: Development and environmental justice. *Science*, 366(6464), 1517–1519. <https://doi.org/10.1126/science.aaz9192>
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st-century business*. Capstone.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- Frias-Aceituno, J. V., Rodríguez-Ariza, L., & García-Sánchez, I. M. (2013). Is integrated reporting determined by a country's legal system? An exploratory study. *Journal of Cleaner Production*, 44, 45–55. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.12.006>

- Gray, R. (2010). Is accounting for sustainability actually accounting for sustainability... and how would we know? An exploration of narratives of organisations and the planet. *Accounting, Organizations and Society*, 35(1), 47–62. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2009.04.006>
- Haqi, M. A., & Yudi, H. (2023). Sustainability blue disclosure in Indonesian fisheries companies. *Journal of Accounting and Sustainability*, 5(2), 55–70.
- Kittinger, J. N., et al. (2017). Committing to socially responsible seafood. *Science*, 356(6341), 912–913. <https://doi.org/10.1126/science.aam9969>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & PRISMA Group. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *PLoS Medicine*, 6(7), e1000097. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>
- O'Donnell, J., Jenkins, L. D., & Winiarski, K. (2019). Blue Accounting: A framework for integrated water resources management. *Marine Policy*, 100, 33–41. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.11.018>
- Silver, J. J., Gray, N. J., Campbell, L. M., Fairbanks, L. W., & Gruby, R. L. (2015). Blue economy and competing discourses in international oceans governance. *Journal of Environment & Development*, 24(2), 135–160. <https://doi.org/10.1177/1070496515580797>
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331>
- United Nations. (2023). *The Sustainable Development Goals Report 2023*. United Nations. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2023>
- World Bank. (2017). *The potential of the blue economy: Increasing long-term benefits of the sustainable use of marine resources for small island developing states and coastal least developed countries*. World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26843>
- World Bank. (2022). *Poverty and shared prosperity 2022: Correcting course*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1893-6>
- Unerman, J., & Chapman, C. (2014). Academic contributions to enhancing accounting for sustainable development. *Accounting, Organizations and Society*, 39(6), 385–394. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2014.07.003>